

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025**



**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN ANGGARAN 2025  
KECAMATAN PURBALINGGA KAB. PURBALINGGA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN PURBALINGGA**

Jl. Cahyana Baru Penambongan, Purbalingga 53314  
E-mail : [purbalingga@purbalinggakab.go.id](mailto:purbalingga@purbalinggakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025. Rencana Kerja ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Purbalingga dalam menentukan kebijakan dan Program serta kegiatan operasional tahun 2025, sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan, untuk mempermudah seluruh jajaran aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Purbalingga tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah. sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.

Purbalingga, September 2024

**CAMAT PURBALINGGA**

Dra. YUNI RAHAYU, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690601 198803 2 001

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>1.1 Latar Belakang.....</b>                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>1.2 Landasan Hukum .....</b>                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>1.3 Maksud dan Tujuan .....</b>                                                                                    | <b>12</b> |
| 1. Maksud.....                                                                                                        | 12        |
| 2. Tujuan .....                                                                                                       | 12        |
| <b>1.4 Sistematika Penulisan.....</b>                                                                                 | <b>13</b> |
| <b>BAB II.....</b>                                                                                                    | <b>14</b> |
| <b>HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PURBALINGGA .....</b>                                                               | <b>14</b> |
| <b>TAHUN 2023 .....</b>                                                                                               | <b>14</b> |
| <b>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Purbalingga.....</b> | <b>14</b> |
| <b>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga .....</b>                                                     | <b>22</b> |
| <b>2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga ..</b>                                  | <b>27</b> |
| <b>2.4 Review terhadap Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 .....</b>                     | <b>39</b> |
| <b>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....</b>                                                    | <b>44</b> |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                   | <b>58</b> |
| <b>TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PURBALINGGA .....</b>                                                                 | <b>58</b> |
| <b>3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....</b>                                                                 | <b>58</b> |
| <b>3.2 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja Kecamatan Purbalingga.....</b>                                                | <b>63</b> |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                   | <b>72</b> |
| <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURBALINGGA .....</b>                                                        | <b>72</b> |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                    | <b>80</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                  | <b>80</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)                                                                                                  | 17 |
| Tabel 2. 2 Jumlah Layanan PATEN Kecamatan Purbalingga .....                                                                                                               | 24 |
| Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa....                                                                                                    | 24 |
| Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat .....                                                                                                              | 25 |
| Tabel 2. 5 PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PURBALINGGA.....                                                                                                                 | 34 |
| Tabel 2. 6 JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR.....                                                                                                                               | 36 |
| Tabel 2. 7 UMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR.....                                                                                                                 | 36 |
| Tabel 2. 8 LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN<br>PURBALINGGA .....                                                                                             | 38 |
| Tabel 2. 9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Kecamatan<br>Purbalingga dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023....                           | 40 |
| Tabel 2. 10 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG<br>PEMERINTAHAN TAHUN 2025 .....                                                                                    | 46 |
| Tabel 2. 11 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG<br>KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025.....                                                                             | 49 |
| Tabel 2. 12 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG<br>EKONOMI TAHUN 2025 .....                                                                                         | 49 |
| Tabel 2. 13 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG<br>INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2025 .....                                                              | 52 |
| Tabel 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PURBALINGGA<br>TAHUN 2023 .....                                                                                             | 67 |
| Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025_Dan<br>Prakiraan Maju Tahun 2025 SKPD Kecamatan purbalingga Kabupaten<br>Purbalingga (Sub Kegiatan }..... | 71 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Purbalingga yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan OPD dan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan publik. Renja 2025 juga merupakan upaya implementasi dari perumusan kebijakan strategis yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dan kegiatan yang tersusun dalam Renja 2025 ini juga tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja 2025 merupakan pengejawantahan atas semangat Otonomi Daerah yang melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Kewenangan ini juga telah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan mengenai pemberian kewenangan kepala daerah kepada Camat yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Kewenangan tersebut juga diharapkan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam pembangunan..

Perangkat Daerah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangannya juga tetap memperhatikan keselarasannya dengan Perencanaan Daerah di tingkat yang lebih tinggi agar senantiasa sinergis dengan visi misi yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten dan hierarki di atasnya. Selain penyusunan Renja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang

juga menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD juga merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa melihat kekurangan pelaksanaan kerja tahun sebelumnya dan bisa memacu kinerja pada tahun berikutnya, terutama peningkatan kualitas PD Kecamatan.

Renja PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja selama satu tahun juga diharapkan mampu digunakan untuk menyelaraskan visi misi, tujuan, dan sasaran strategis dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar bisa dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonomi karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Kompleksitas tersebut kemudian akan diformulasikan dalam perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya

kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Purbalingga yang dibahas melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Purbalingga.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 114);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)

35. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
36. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja Kecamatan Purbalingga dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

#### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Purbalingga adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Purbalingga dalam menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2025.
- b. Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan kecamatan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- d. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I     Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II    Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2023**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Purbalingga
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga
- 2.4 Review Rencana Kerja Terhadap RKPD Kecamatan Purbalingga
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III   Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Purbalingga
- 3.3 Program dan Kegiatan kecamatan Purbalingga

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

##### **BAB V     Penutup**

##### **Lampiran**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PURBALINGGA TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Purbalingga**

Kecamatan Purbalingga pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Program dan Kegiatan tersebut termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi:
    - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi:
    - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
    - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
    - 1.3.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - 1.3.6. Penyediaan Bahan/Material
    - 1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:

- 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 1.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - 1.5.1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat;
  - 1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
  - 1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 1.6.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya;
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik meliputi:
  - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi:
    - 2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - 2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat meliputi:
    - 2.2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:
  - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi:
    - 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

- 3.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:
  - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:
    - 4.1.1. Sinergitas dengan POLRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
    - 4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi
  - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi:
    - 5.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
    - 5.1.2. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Purbalingga, berikut disajikan evaluasi akuntabilitas kinerja PD Kecamatan Purbalingga menggambarkan pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2022:



**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)**

**SKPD : KECAMATAN PURBALINGGA**

Lembar : dari

| Kode |  |  |  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)       | Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2023) |                            |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024              |                                              |
|------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |  |  |  |                                                                   |                                                               |                                                     |                                                                             | Target Renja Tahun 2023                                              | Realisasi Renja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) |                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1)  |  |  |  | (2)                                                               | (3)                                                           | (4)                                                 | (5)                                                                         | (6)                                                                  | (7)                        | (8) = (7/6)           | (9)                                            | (10)=(5+7+9)                                                           | (11)=(10/4)                                  |
|      |  |  |  |                                                                   |                                                               |                                                     |                                                                             |                                                                      |                            |                       |                                                |                                                                        |                                              |
|      |  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <b>Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja</b>        |                                                     |                                                                             | <b>100%</b>                                                          | <b>100%</b>                | <b>100%</b>           | <b>100%</b>                                    | <b>100%</b>                                                            | <b>100%</b>                                  |
|      |  |  |  | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu | 100%                                                | 100%                                                                        | 100%                                                                 | 90%                        | 100 %                 | 100%                                           | 100%                                                                   | 100%                                         |
|      |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | 100%                                                | 100%                                                                        | 100%                                                                 | 100%                       | 100 %                 | 100%                                           | 100%                                                                   | 100%                                         |
|      |  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | NA                                                  | NA                                                                          | 4 dokumen                                                            | 4 dokumen                  | 100%                  | 4 dokumen                                      | 4 dokumen                                                              | 100%                                         |

|  |  |  |  |                                                                  |                                                                               |    |    |                  |                  |      |                  |                  |      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|
|  |  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan</b> | NA | NA | 100 persen       | 100 persen       | 100% | 100 persen       | 100 persen       | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                            | NA | NA | 92 Orang / Bulan | 92 Orang / Bulan | 100% | 84 Orang / Bulan | 84 Orang / Bulan | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                              | NA | NA | 10 dokumen       | 10 dokumen       | 100% | 6 dokumen        | 6 dokumen        | 100% |
|  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                       | NA | NA | 12 laporan       | 12 laporan       | 100% | 12 laporan       | 12 laporan       | 100% |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    | <b>Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Barang</b>                    | NA | NA | 100%             | 100%             | 100% | 100%             | 100%             | 100% |
|  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                     | NA | NA | 12 laporan       | 12 laporan       | 100% | 12 laporan       | 12 laporan       | 100% |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Prosentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum</b>                      | NA | NA | 100%             | 100%             | 100% | 100%             | 100%             | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | NA | NA | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                             | NA | NA | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | NA | NA | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% | 12 bulan         | 12 bulan         | 100% |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       | NA | NA | 12 laporan       | 12 laporan       | 100% | 1 laporan        | 1 laporan        | 100% |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | NA | NA | 30 laporan       | 30 laporan       | 100% | 30 laporan       | 30 laporan       | 100% |

|  |  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                    |    |    |            |            |      |            |            |      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|------|------------|------------|------|
|  |  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                           | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                               | NA | NA | 12 laporan | 12 laporan | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100% |
|  |  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      | <b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                         | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Tersedianya Jasa Surat Menyurat                                                                                    | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                 | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | NA | NA | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% | 12 bulan   | 12 bulan   | 100% |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, atau Lapangan | NA | NA | 9 unit     | 9 unit     | 100% | 9 unit     | 9 unit     | 100% |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                             | NA | NA | 2 unit     | 2 unit     | 100% | 2 unit     | 2 unit     | 100% |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                | <b>Nilai Evaluasi Pelayanan Publik</b>                                                                             | NA | NA | 100%       | 100%       | 100% | 100%       | 100%       | 100% |
|  |  |  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                             | <b>Jumlah Pelayanan yang Dilaksanakan</b>                                                                          | NA | NA | 2,5        | 2,5        | 100% | 4,5        | 4,5        | 100% |

|  |  |  |  |                                                                                                                               |                                                                                                                                             |    |    |             |             |      |             |             |      |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|------|-------------|-------------|------|
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                              | Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                            | NA | NA | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     | <b>Prosentase Keaktifan Lembaga Desa</b>                                                                                                    | NA | NA | 100%        | 100%        | 100% | 100%        | 100%        | 100% |
|  |  |  |  | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                                  | <b>Jumlah Fasilitas Lembaga dan Forum Kemasyarakatan</b>                                                                                    | NA | NA | 13 kegiatan | 13 kegiatan | 100% | 13 kegiatan | 13 kegiatan | 100% |
|  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | Jumlah Lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                        | NA | NA | 13 lembaga  | 13 lembaga  | 100% | 2 lembaga   | 2 lembaga   | 100% |
|  |  |  |  | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah laporan peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                | NA | NA | 17 laporan  | 17 laporan  | 100% | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                    | <b>Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                    | NA | NA | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 100% | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 100% |
|  |  |  |  | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      | <b>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                             | NA | NA | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100% | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100% |
|  |  |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | NA | NA | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100% | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100% |
|  |  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | NA | NA | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% |
|  |  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                            | <b>Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan</b>                                                                                              | NA | NA | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% |

|  |  |  |  |                                                                                                  |                                                                              |    |    |               |               |      |               |            |      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|---------------|------|---------------|------------|------|
|  |  |  |  | UMUM                                                                                             |                                                                              |    |    |               |               |      |               |            |      |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan Umum<br>sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah              | Jumlah Laporan Potensi<br>Konflik                                            | NA | NA | 12<br>laporan | 12<br>laporan | 42%  | 12<br>laporan | 12 laporan | 42%  |
|  |  |  |  | Pembinaan Persatuan<br>dan Kesatuan Bangsa                                                       | Jumlah orang yang<br>mengikuti Pembinaan<br>Persatuan dan Kesatuan<br>Bangsa | NA | NA | 50 orang      | 50 orang      | 100% | 50 orang      | 50 orang   | 42%  |
|  |  |  |  | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                   | Prosentase Desa yang<br>melaksanakan tertib<br>administrasi                  | NA | NA | 4 kegiatan    | 4 kegiatan    | 100% | 4<br>kegiatan | 4 kegiatan | 100% |
|  |  |  |  | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang<br>melaksanakan tertib<br>administrasi                     | NA | NA | 100%          | 100%          | 100% | 100%          | 100%       | 100% |
|  |  |  |  | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan Desa                                                | Terlaksananya Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa           | NA | NA | 100%          | 100%          | 100% | 100%          | 100%       | 100% |

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2023 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Purbalingga. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Purbalingga**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Purbalingga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta berdasarkan Renstra Kecamatan Purbalingga Tahun 2021 s.d 2026. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain:

### **A. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan**

1. Meningkatnya keluhan pengaduan pelayanan yang ditindak lanjuti;
2. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian umum dan kepegawaian;
3. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan urusan bagian keuangan;
4. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
5. Meningkatnya penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatnya pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
7. Meningkatnya prosentase perencanaan pembangunan;
8. Meningkatnya evaluasi dan pelaporan kinerja;

### **B. Meningkatnya Kinerja Monitoring dan Koordinasi Wilayah**

1. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lintas sektor
2. Meningkatnya koordinasi dengan organisasi tingkat kecamatan

3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan supervisi pemerintahan desa dan lembaga desa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Purbalingga memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

**A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum meliputi beberapa jenis, antara lain:

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN yang meliputi pelayanan:
  - 1.1. Pelayanan Perizinan:
    - 1.1.1. Pelayanan Izin Dispensasi Nikah;
    - 1.1.2. Pelayanan Izin Keramaian;
    - 1.1.3. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
  - 1.2. Pelayanan Nonperizinan:
    - 1.2.1. Pelayanan KTP dan KK;
    - 1.2.2. Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
    - 1.2.3. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;
    - 1.2.4. Pelayanan PPAT;
    - 1.2.5. Pelayanan Legalisasi Surat;
2. Fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
5. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
6. Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip;
7. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
8. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga;
9. Fasilitasi/koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait;
10. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
11. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
12. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
13. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Kinerja bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum sepanjang tahun 2023 dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Layanan PATEN Kecamatan Purbalingga**

| No. | Uraian                                                    | Tahun<br>2023 |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Pelayanan Perizinan                                       | 187           |
| 2.  | Pelayanan Nonperizinan                                    | 3.127         |
| 3.  | Fasilitasi Pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades) | 4             |
| 4.  | Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati           | 4             |
| 5.  | Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintah       | 12            |
| 6.  | Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip                     | 13            |
| 7.  | Melaksanakan Kegiatan Peringatan HUT RI                   | 1             |
| 8.  | Melaksanakan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga     | 1             |

**B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang meliputi beberapa program dan agenda yang meliputi:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penyelenggaraan Musdes/Musrenbandes di tingkat desa;
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;
4. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD, DD;
5. Melaksanakan *Roadshow* UMKM;

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sepanjang tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 3**  
**Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

| No. | Uraian                                                 | Tahun |
|-----|--------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                        | 2023  |
| 1.  | Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Desa               | 13    |
| 2.  | Melaksanakan Musrenbang Kecamatan                      | 1     |
| 3.  | Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten                 | 1     |
| 4.  | Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BangProv, ADD, DD | 31    |
| 5.  | Melaksanakan <i>Roadshow</i> UMKM                      | 0     |



Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam sajian tabel di atas menunjukkan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PD Kecamatan Purbalingga melaksanakan tugasnya dengan mendampingi dan memfasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Desa di seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga.

PD Kecamatan Purbalingga juga konsisten mengikuti Musrenbang Kabupaten dan senantiasa melakukan Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BangProv, ADD, DD ke dua Desa yang terdapat di Kecamatan Purbalingga, yaitu Desa Toyareja dan Desa Jatisaba.

### **C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga dapat dilihat melalui beberapa program dan agenda seperti di bawah ini:

1. Melaksanakan kegiatan Istighozah;
2. Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti kegiatan perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga;
5. Mengikuti kegiatan PKK;
6. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita;
7. Mengikuti kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun dana PMI;
10. Mengikuti kegiatan Sunatan massal dan Nikah Massal;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga dapat dilihat melalui sajian tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 4**  
**Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat**

| No. | Uraian                                                           | Tahun |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                  | 2023  |
| 1.  | Mengikuti Kegiatan Hari Santri                                   | 1     |
| 2.  | Mengikuti Kegiatan Perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga | 1     |
| 3.  | Mengikuti kegiatan PKK                                           | 12    |
| 4.  | Mengikuti kegiatan Dharma Wanita                                 | 14    |
| 5.  | Mengikuti kegiatan GOPTKI                                        | 12    |
| 6.  | Penyaluran Bansos dan Bankesra                                   | 7     |

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 7. | Menghimpun dana PMI                                | 1 |
| 8. | Mengikuti kegiatan Sunatan Massal dan nikah massal | 0 |

Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga turut melakukan upaya membantu pemerintah daerah yang berusaha membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan karena keadaan pandemi. Kegiatan Penyaluran Bansos dan Bankesra, serta menghimpun dana PMI dilaksanakan Bidang Kesejahteraan Rakyat PD Kecamatan Purbalingga sebagai pelaksanaan tugas dari pemerintah daerah untuk membuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Purbalingga**

Kecamatan Purbalingga sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas pokok serta fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, Kecamatan Purbalingga juga diwajibkan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Kecamatan Purbalingga sepanjang menjalankan tugas pokok dan fungsinya kerap kali menghadapi permasalahan dan hambatan. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Purbalingga dibagi ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Penjabaran dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Purbalingga berdasarkan dua faktor di atas bisa dirunut dari sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Purbalingga dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Purbalingga.

#### **A. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Purbalingga dari Faktor Internal**

Secara garis besar, kinerja pelayanan Kecamatan Purbalingga yang terbagi dalam Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bidang Kesejahteraan Rakyat menunjukkan performa yang cukup baik. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang harus dicari jalan keluarnya.

Inventarisir atas permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Purbalingga dijabarkan ke dalam faktor internal meliputi beberapa aspek di bawah ini:

1. Kelembagaan Kecamatan;
2. Sumber Daya Manusia Kecamatan;
3. Sarana dan Prasarana di Kantor Kecamatan Purbalingga;
4. Alokasi Anggaran;

Berikut dijabarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan berdasarkan aspek-aspek yang terdapat di dalam faktor internal:

### **1. Aspek Kajian Kelembagaan Kecamatan**

Permasalahan dan hambatan dari aspek kelembagaan Kecamatan Purbalingga bisa dilihat dari temuan-temuan oleh Bidang-bidang yang terdapat di dalam Kecamatan Purbalingga. Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum dalam pelayanannya kepada masyarakat masih terhambat oleh masalah waktu pelayanan yang masih belum terstandar, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang informatif dalam Pelayanan.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemukan kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik di desa/kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.

Bidang Kesejahteraan Masyarakat masih menemui kendala karena tidak adanya kejelasan nomenklatur terkait dengan Tupoksi Kesra, serta terbatasnya anggaran untuk menunjang Program kegiatan Kesra.

### **2. Aspek Kajian Sumber Daya Manusia Kecamatan Purbalingga**

Permasalahan dan hambatan dari aspek Sumber Daya Manusia di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat dari kemampuan *softskills* pegawai di lingkungan Kecamatan Purbalingga yang masih kurang cakap dalam mengoperasikan beberapa perangkat lunak.

Hambatan terkait penguasaan perangkat lunak seperti Ms. Word, Ms. Excel, dan beberapa pelayanan berbasis aplikasi menjadikan beberapa pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat.

### **3. Aspek Kajian Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang masih masih terbatas di lingkungan Kecamatan Purbalingga seperti ketiadaan aplikasi pendaftaran pelayanan PATEN secara daring, jumlah Personal Komputer yang masih kurang membuat hal tersebut menjadi permasalahan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Selain itu, belum adanya sarana prasarana nomor antrean membuat masyarakat menjadi terhambat dan merupakan permasalahan tersendiri bagi Kecamatan Purbalingga. Kondisi tersebut perlu dibenahi demi memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat oleh Kecamatan Purbalingga.

#### **4. Aspek Jumlah Anggaran Kecamatan Purbalingga**

Dinamisnya kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga dan tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang yang masih rendah menjadikan penyusunan Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini belum mampu menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini membuat beberapa pos alokasi di dalam anggaran mengalami perubahan terutama di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Bidang Pemerintahan, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum.

#### **B. Permasalahan dan Hambatan Kecamatan Purbalingga dari Faktor Eksternal**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Purbalingga dari faktor eksternal yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur Sipil Negara Kecamatan; Kurang akurat dan sedikitnya data perencanaan pembangunan yang ada di Kecamatan Purbalingga; serta belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kebijakan Nasional yang pelaksanaannya perlu peran serta hingga tingkat OPD sedikitnya terbagi ke dalam 13 isu, yaitu:

##### **1. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance* memiliki beberapa komponen sebagai tolok ukur keberhasilan. Sedikitnya terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan,
- 2) Ketepatan,
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi)

yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
  - 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
  - 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
  - 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
  - 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
  - 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelolaan birokrasi Pemerintahan Desa.

Peningkatan kapasitas adalah proses di mana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan masalah dan mengatur pencapaian tujuan. Peningkatan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta mengharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang peningkatan kapasitas strategis dan program.

Dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa dan kelurahan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan stakeholder
- 2) Partisipatif: pelibatan semua pria dan wanita yang terlibat dalam pengambilan keputusan selama proses berlangsung;
- 3) Transparan : proses transparansi harus dibangun atas arus informasi yang bebas
- 4) *Equitable*: adanya kesetaraan gender terhadap arus informasi yang bebas

- 5) Akuntabel: pembuat keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggungjawab terhadap publik serta stakeholder kelembagaan
- 6) Konsensus: Berorientasi pada kepentingan terbaik dari seluruh kelompok
- 7) Efektif dan efisien: Proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan penggunaan sumberdaya terbaik.

Untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan Kelurahan yang aktif, beberapa kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Perberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
  - 2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - 3) Pemberdayaan UMKM dan Usaha Mikro di Desa/Kelurahan
  - 4) Pelestarian dan Pemberdayaan adat istiadat;
  - 5) Penguatan kapasitas lembaga lembaga desa lainnya;
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- 1) Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
  - 2) Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP ;
4. Teknologi dan inovasi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

5. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap OPD. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

6. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan public untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya.

7. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

8. IDM (Indek Desa Membangun)

Sesuai data IDM di Kecamatan Purbalingga Tahun 2023, status desa yang masuk wilayah Kecamatan Purbalingga ada 2 (dua) desa dan 11 (sebelas) Kelurahan. Dua Desa tersebut sudah termasuk desa Maju yaitu desa Toyareja dan Desa Jatisaba.



#### 9. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional.

Kecamatan Purbalingga memiliki 2 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

##### PROFIL BUMDES KECAMATAN PURBALINGGA

| No. | Nama                | Alamat                                                     | Jenis Usaha                                                                                                         | Keterangan | Desa/<br>Kecamatan           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1.  | Linggamas           | Jl. Cahyana Baru<br>Kel. Penambongan Purbalingga           | Keuangan : SPP<br>( Simpan Pinjam Perempuan )                                                                       | Berkembang | Penambongan<br>, Purbalingga |
| 2.  | Jati Berkah Lestari | Jalan Letnan Kusni Kec.<br>Purbalingga Kab.<br>Purbalingga | - Pertanian : -<br>- Jasa :<br>persampahan<br>- Peternakan :<br>penggemukan sapi<br>- Persewaan : -<br>- Wisata : - | Tumbuh     | Purbalingga                  |

#### 10. Kawasan rawan bencana

Sangat diperlukan adanya pemetaan daerah rawan bencana, agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi, sehingga korban jiwa dapat di

tekan saat terjadinya bencana. Di wilayah Kecamatan Purbalingga termasuk daerah rawan bencana banjir, angin ribut dan kebakaran

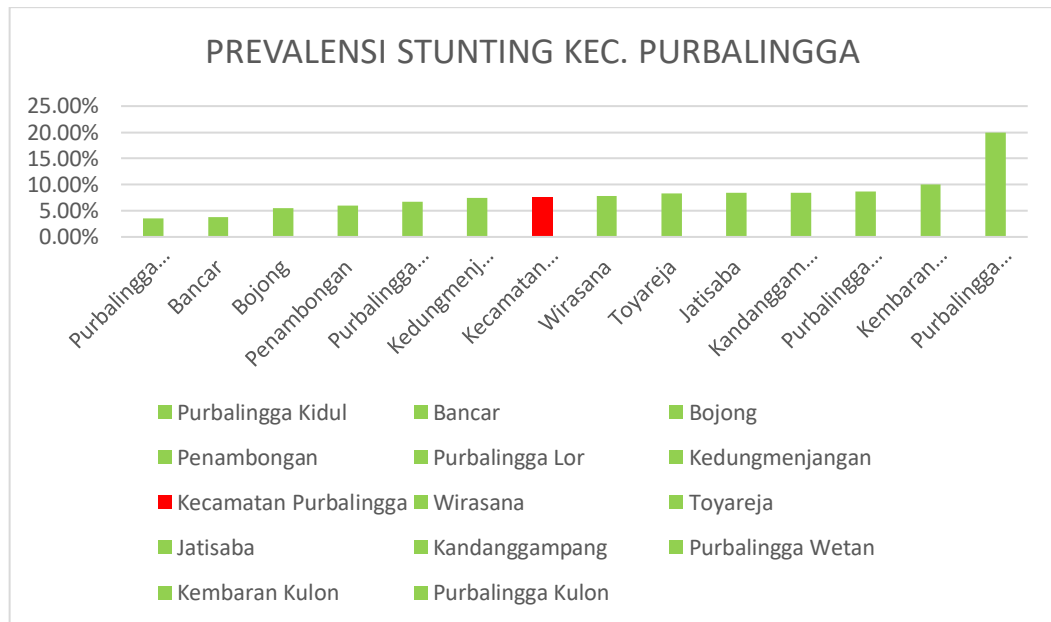
#### 11. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.

**Tabel 2. 5 PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PURBALINGGA**

| Desa/Kelurahan    | Jumlah Balita | Sangat Pendek | Pendek | Jumlah Stunted | Prevalensi Stunting |
|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------------|
| KEC. PURBALINGGA  | 2660          | 25            | 182    | 201            | 7,56%               |
| BANCAR            | 131           | 0             | 5      | 5              | 3,82%               |
| BOJONG            | 270           | 3             | 12     | 15             | 5,56%               |
| JATISABA          | 167           | 0             | 14     | 14             | 8,38%               |
| KANDANG GAMPANG   | 142           | 0             | 12     | 12             | 8,45%               |
| KEDUNG MENJANGAN  | 162           | 0             | 12     | 12             | 7,41%               |
| KEMBARAN KULON    | 179           | 5             | 13     | 18             | 10,06%              |
| PENAMBONGAN       | 134           | 3             | 5      | 8              | 5,97%               |
| PURBALINGGA KIDUL | 258           | 0             | 9      | 9              | 3,49%               |
| PURBALINGGA KULON | 110           | 4             | 18     | 22             | 20%                 |
| PURBALINGGA LOR   | 311           | 4             | 17     | 21             | 6,75%               |
| PURBALINGGA WETAN | 219           | 3             | 16     | 19             | 8,68%               |
| TOYAREJA          | 157           | 3             | 10     | 13             | 8,28%               |
| WIRASANA          | 420           | 0             | 33     | 33             | 7,86%               |

## GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN PURBALINGGA



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 desa/kelurahan yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Kelurahan Wirasana, Desa Toyareja, Desa Jatisaba, Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kelurahan Kembaran Kulon dan Kelurahan Purbalingga Kulon.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta;

6. Mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak.

## 12. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

**Tabel 2. 6 JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR**

| Kondisi Akhir ATS (orang) |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| Usia 7-12                 | Usia 13-15 | Usia 16-18 |
| 12                        | 30         | 61         |

**Tabel 2. 7 UMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR**

| Kondisi Akhir ATS (orang) |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| SD/SDLB                   | SMP/SMPLB | SMA/SMALB |
| 30                        | 34        | 31        |

Pada Kecamatan Purbalingga terdapat 12 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 30 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 61 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 30 anak, SMP/SMPLB sejumlah 34 anak, SMA/SMALB sejumlah 31 anak, dan tidak sekolah sejumlah 8 anak.

### 13. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). *Purchasing Power Parity* adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Juli 2024, Garis Kemiskinan Ekstrem pada Maret 2024 mencapai 0.83 % atau menurun jika dibandingkan Maret 2023 dan tren penurunan ini perlu dijaga.

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,31 persen, dari 15,30 menjadi 14,99 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 1.920 jiwa. Dari 145.330 orang menjadi 143.410 jiwa.

Namun demikian Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,08 persen di tahun 2022 menjadi menjadi 2,52 persen atau naik sebesar 0,44 persen. Dan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,48 persen di tahun 2022 menjadi 0,58 ditahun 2023 atau naik sebesar 0,1 persen. (Data BPS hasil susenas 2023).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Purbalingga untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

**Tabel 2. 8**  
**LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN**  
**PURBALINGGA**

| NO | KECAMATAN   | DESA              |
|----|-------------|-------------------|
| 1  | PURBALINGGA | JATISABA          |
| 2  | PURBALINGGA | PURBALINGGA KIDUL |
| 3  | PURBALINGGA | TOYAREJA          |

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan ( Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah ( Rehab Rumah tidak layak )

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ.

## **2.4 Review terhadap Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023**

Rencana Kerja Renja RKPD Tahun 2023 merupakan acuan dalam penyusunan kerja setiap OPD pada tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan tersebut terdapat beberapa penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD untuk menyelaraskan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penyesuaian tersebut terjadi pula di Kecamatan Purbalingga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dalam tiap program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Purbalingga sendiri digunakan sebagai dokumen pendukung dari pelaksanaan Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan yang berlokasi di wilayah Kecamatan Purbalingga. Rencana Kerja prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Purbalingga untuk tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dan evaluasi terhadap hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenmbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah, dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

**Tabel 2. 9**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Purbalingga dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

**SKPD : KECAMATAN PURBALINGGA**

Lembar : dari

| No. | Rencana Kerja Rencana Kerja SKPD                                   |                         |                                                                                |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                                           |                         |                                                                                |                |                         | Catatan Penting |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
|     | Program/ Kegiatan                                                  | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan                                                  | Lokasi                  | Indikator Kinerja                                                              | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) |                 |
| (1) | (2)                                                                | (3)                     | (4)                                                                            | (5)            | (6)                     | (7)                                                                | (8)                     | (9)                                                                            | (10)           | (11)                    | (12)            |
|     | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kec. Purbalingga</b> | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan | <b>100%</b>    | <b>9.977.789.000</b>    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Kec. Purbalingga</b> | Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Diserahkan Tepat Waktu sesuai Ketentuan | <b>100%</b>    | <b>9.435.061.000</b>    |                 |
| 1.  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Kec. Purbalingga        | Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD              | 12 Bulan/ 100% | 1.610.000               | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  | Kec. Purbalingga        | Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD              | 12 Bulan/ 100% | 1.610.000               |                 |
| 2.  | Administarsi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kec. Purbalingga        | Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti                    | 12 Bulan/ 100% | 9.706.643.000           | Administarsi Keuangan Perangkat Daerah                             | Kec. Purbalingga        | Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindaklanjuti                    | 12 Bulan/ 100% | 9.153.915.000           |                 |
| 3.  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Kec. Purbalingga        | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah        | 12 bulan/ 100% | 1.050.000               | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             | Kec. Purbalingga        | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah        | 12 bulan/ 100% | 1.050.000               |                 |



|    |                                                                       |                  |                                                                       |                |                   |                                                                       |                  |                                                                       |                |                   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 4. | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Kec. Purbalingga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                      | 12 Bulan/ 100% | 10.307.000        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Kec. Purbalingga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                      | 12 Bulan/ 100% | 10.307.000        |  |
| 5. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Kec. Purbalingga | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | 12 Bulan/ 100% | 0                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Kec. Purbalingga | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | 12 Bulan/ 100% | 10.000.000        |  |
| 6. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah                    | Kec. Purbalingga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                      | 12 Bulan/ 10   | 148.898.000       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah                    | Kec. Purbalingga | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                      | 12 Bulan/ 100% | 148.898.000       |  |
| 7. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Kec. Purbalingga | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan/ 100% | 109.281.000       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Kec. Purbalingga | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan/ 100% | 109.281.000       |  |
| 2. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>      | Kec. Purbalingga | Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Purbalingga         | 12             | <b>23.438.000</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>      | Kec. Purbalingga | Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan Kecamatan Purbalingga         | 12             | <b>53.438.000</b> |  |
| 1. | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | Kec. Purbalingga | IKM Pelayanan Publik                                                  | 12 Bulan/ 100% | 20.638.000        | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan | Kec. Purbalingga | IKM Pelayanan Publik                                                  | 12 Bulan/ 100  | 50.638.000        |  |
| 2. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Kec. Purbalingga | Cakupan pelanggaran perda yang ditangani                              | 12             | 2.800.000,00      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Kec. Purbalingga | Cakupan pelanggaran perda yang ditangani                              | 12             | 2.800.000,00      |  |

|    |                                                                         |                  |                                                                     |                           |               |                                                                                  |                  |                                                                     |                           |               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--|
| 3. | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>               | Kec. Purbalingga | Cakupan Desa Maju dan Mandiri                                       | 50%                       | 36.591.000,00 | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                        | Kec. Purbalingga | Cakupan Desa Maju dan Mandiri                                       | 50%                       | 36.591.000,00 |  |
| 1  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | Kec. Purbalingga | Cakupan Desa Maju dan Mandiri                                       | 50%                       | 36.591.000,00 | Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Purbalingga | Cakupan Desa Maju dan Mandiri                                       | 50%                       | 36.591.000,00 |  |
| 4. | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>               | Kec. Purbalingga | Manajemen terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum membaik | 100 %                     | 30.553.000,00 | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                        | Kec. Purbalingga | Manajemen terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum membaik | 100%                      | 30.553.000,00 |  |
| 1  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Kec. Purbalingga | Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan           | 2 per 10.000 penduduk     | 30.553.000,00 | Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah         | Kec. Purbalingga | Angka kasus kriminalitas per 10.000 penduduk di kecamatan           | 2 per 10.000 penduduk     | 30.553.000,00 |  |
| 5. | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                 | Kec. Purbalingga | Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan     | 0,099 per 10.000 penduduk | 39.954.000,00 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                          | Kec. Purbalingga | Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan     | 0,099 per 10.000 penduduk | 39.954.000,00 |  |
| 1  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepada Daerah | Kec. Purbalingga | Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan     | 0,099 per 10.000 penduduk | 39.954.000,00 | Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa                                            | Kec. Purbalingga | Angka kasus konflik horizontal per 10.000 penduduk di kecamatan     | 0,099 per 10.000 penduduk | 39.954.000,00 |  |
| 6. | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAH DESA</b>                  | Kec. Purbalingga | Persentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi       | 100%                      | 400.000,00    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMRINTAH DESA</b>                           | Kec. Purbalingga | Persentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi       | 100%                      | 400.000,00    |  |

|   |                                                                                 |                  |                                              |      |            |                                                                                 |                  |                                              |      |           |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------|-----------|--|
| 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Purbalingga | Terfasilitasi administrasi Pemerintahan desa | 100% | 400.000,00 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | Kec. Purbalingga | Terfasilitasi administrasi Pemerintahan desa | 100% | 40.000,00 |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------|-----------|--|

Berdasarkan tabel di atas, program dan kegiatan yang mengalami perubahan dari sisi anggaran. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terbagi dalam 7 kegiatan dalam perencanaan sebelum perubahan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 10.108.725.000,-. Setelah dilakukan perubahan anggaran yang tercantum menurun sebesar 6,67 % menjadi sebesar Rp. 9.435.061.000,-. Perubahan anggaran pada program ini dikarenakan adanya beberapa ASN yang purna tugas/pensiun.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam rincian DPA tahun 2023 juga mengalami perubahan anggaran dari sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.23.438.000,- naik menjadi Rp.53.438.000,-.

Semua program dan kegiatan tersebut merupakan program lanjutan PD Kecamatan Purbalingga dan telah termuat dalam Ranwal Renja dan semuanya telah sesuai dengan arahan Rencana Kerja RKPD.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Purbalingga juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa dan kelurahan yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilah dan memilih berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka membantu mewujudkan visi misi kabupaten purbalingga maka perlu dilaksanakan dan dicapai, oleh karena itu kecamatan Purbalingga tahun 2025 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2. 10 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN  
TAHUN 2025**

| No  | Usulan                                                                                         | Permasalahan                                                                                                           | Lokasi (desa/ kel)                                                                                                | Kecamatan/<br>Desa/ Kelurahan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                   |                               |
| (1) | (4)                                                                                            | (3)                                                                                                                    | (7)                                                                                                               | (2)                           |
| 1   | Pembangunan PKD                                                                                | Rehabilitasi Gedung PKD karena plafon sudah rusak berat dan pondasi sudah terkikis air sungai                          | RT 01 RW 01 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                             | Kedungmenjangan               |
| 2   | Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa                                                  | atap dan bangunan sudah rusak berat                                                                                    | RT 01 RW 01 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                             | Kedungmenjangan               |
| 3   | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Sungai Gringsing sering terjadi banjir dan longsor dipemukiman dan tanah kuburan dan menyebabkan wilayah menjadi kumuh | RT 01,03,04,05 RW 01 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                    | Kedungmenjangan               |
| 4   | Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa                                                  | Aula Balai Desa yang sudah rusak perlu adanya perbaikan                                                                | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                            | Toyareja                      |
| 5   | Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu                                            | Puskesmas Pembantu kondisinya telah rusak berat                                                                        | RT 007 RW 003 Jatisaba, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba                                                   | Jatisaba                      |
| 6   | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan | Bangunan yang lama kurang prefesentif terlalu sempit                                                                   | Komplek Perumahan Gria Abdi Kencana Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan | Purbalingga Wetan             |
| 7   | Rehabilitasi Gedung / Sarana / Prasarana Desa                                                  | Aula kelurahan terlalu sempit dan tidak prefesentif sangat membutuhkan Aula untuk kegiatan warga                       | Komplek Perumahan Gria Abdi Kencana Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan | Purbalingga Wetan             |

|    |                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8  | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Saluran sudah rusak dan sering banjir pada waktu hujan                                                             | Komplek Perumahan Griya Abdi Kencana Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan | Purbalingga Wetan |
| 9  | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa                                        | Jalan gelap sering terjadi kecelakaan                                                                              | Rt 01 Rw. 01 Kelurahan Purbalingga Wetan , Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan                        | Purbalingga Wetan |
| 10 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Saluran sudah dangkal sering terjadi banjir air masuk perumahan pada musim hujan                                   | Wilayah Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan                | Purbalingga Wetan |
| 11 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Kalau hujan sering terjadi banjir atau meluap karena kondisi talud yang kurang baik.                               | Bojong RT 02,03 RW 02, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                                                       | Bojong            |
| 12 | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan | Kondisi Tembok Keliling kantor yang sudah terlalu lapuk dan tidak layak sehingga membahayakan.                     | Kantor kelurahan Bojong RT 04 RW 02 , Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                                        | Bojong            |
| 13 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Kondisi samping sungai sudah banyak yang longsor ditambah buruk lagi jika kondisi hujan tanah banyak yang longsor. | Bojong RT 05 RW 2, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                                                           | Bojong            |
| 14 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Belum ada jalan tembus yang menghubungkan Perum Traju malang RT 005/001 Ke RT 001/001                              | RT 005/001, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                                       | Purbalingga Kulon |
| 15 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Pembangunan talud Sungai Gringsing untuk penanggulangan banjir RT 004, RT 003 RW 001 dan RT 001 RW 002             | RT 003 DAN RT 004/001, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                            | Purbalingga Kulon |
| 16 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Jalan sudah rusak                                                                                                  | RT 001 dan 002/003, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                               | Purbalingga Kulon |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                  |                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Talud Sungai Gringsing longsor di RT 001/002                                                                                                  | RT 001/002, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                     | Purbalingga Kulon |
| 18 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Jalan bantaran sungai jeblos RT 003/001                                                                                                       | RT 003/001, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                     | Purbalingga Kulon |
| 19 | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan | Gedung aula Kantor Kelurahan Bancar sudah tidak representatif                                                                                 | Jalan S. Parman No.7, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                                      | Bancar            |
| 20 | Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Infrastruktur lingkungan kelurahan | Ruang pelayanan Kantor Lurah Bancar perlu menjauh dari jalan raya karena bising                                                               | Jalan S Parman No 7, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                                       | Bancar            |
| 21 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa                                    | Rusaknya Trotoar ( Area Jalan ) di sekitar Jalan Pucung Rumbak yg sudah representatif                                                         | Jl. Pucuk Rumbak Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                         | Bancar            |
| 22 | Revitalisasi makam desa                                                                        | Kurang adanya area pemakaman Cikalong Kelurahan Bancar, di karenakan area pemakaman sudah mencapai batas                                      | RT 003 RW 006 Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                            | Bancar            |
| 23 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                                                      | Kurang adanya Pagar Pengaman Luapan Sungai Larangan II sehingga ketika curah hujan besar, aliran sungai larangan meluap ke permukiman warga   | RW 004 sampai RW 006, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                                      | Bancar            |
| 24 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa                                        | Lampu penerangan Jalan Pucung Rumbak dan Jalan Letnan Ahmadi sudah representatif. Penerangan jalan menjadi gelap dan rawan terjadi kecelakaan | Jl Pucung Rumbak sampai Jl Letnan Ahmadi Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar | Bancar            |



**Tabel 2. 11 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG  
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2025**

| No  | Usulan                                                                   | Permasalahan                                                                                                       | Lokasi (desa/ kel)                                                                                                                   | Kecamatan/<br>Desa/<br>Kelurahan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                  |
| (1) | (4)                                                                      | (3)                                                                                                                | (7)                                                                                                                                  | (2)                              |
| 1   | Penguatan kelembagaan /<br>Penyuluhan mengenai hak<br>anak dan perempuan | Untuk meningkatkan<br>pemahaman                                                                                    | Desa Toyareja, Kab.<br>Purbalingga,<br>Purbalingga, Toyareja                                                                         | Toyareja                         |
| 2   | Pengadaan alat kesenian<br>(gamelan)                                     | Karang Taruna /Pemuda<br>kurang kreatifitas                                                                        | Wilayah Rt. 05 dan<br>Rw. 05, Kab.<br>Purbalingga,<br>Purbalingga,<br>Purbalingga Wetan                                              | Purbalingga Wetan                |
| 3   | Pembangunan PKD                                                          | Kelurahan Purbalingga<br>Lor belum mempunyai<br>PKD yang representatif<br>sebagai pengganti PKD<br>yang dibongkar. | Jalan Jambukarang<br>No. 03 kompleks<br>Kantor Kelurahan<br>Purbalingga Lor, Kab.<br>Purbalingga,<br>Purbalingga,<br>Purbalingga Lor | Purbalingga Lor                  |
| 4   | Pembinaan dan bantuan<br>buku perpustakaan desa                          | Perlunya pelatihan<br>pengelolaan<br>perpustakaan bagi TP<br>PKK Kelurahan Bancar                                  | Jl. S. Parman No.7,<br>Kab. Purbalingga,<br>Purbalingga, Bancar                                                                      | Bancar                           |

**Tabel 2. 12 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG EKONOMI TAHUN  
2025**

| No  | Usulan                                                                      | Permasalahan                                                                           | Lokasi (desa/ kel)                                                                                   | Kecamatan/<br>Desa/ Kelurahan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                                        |                                                                                                      |                               |
| (1) | (4)                                                                         | (3)                                                                                    | (7)                                                                                                  | (2)                           |
| 1   | Pembangunan dan<br>pemeliharaan jaringan<br>irigasi tersier (usaha<br>tani) | Pada musim hujan selalu<br>banjir pada persawahan<br>yang mengakibatkan<br>gagal panen | RT 02 RW 03<br>Kelurahan<br>kedungmenjangan,<br>Kab. Purbalingga,<br>Purbalingga,<br>Kedungmenjangan | Kedungmenjangan               |
| 2   | Pembangunan dan<br>peningkatan jalan usaha<br>tani (jitut jides)            | Akses petani membawa<br>hasil pertanian mengalami<br>kendala                           | RT 01 RW 02<br>Kelurahan<br>Kedungmenjangan,<br>Kab. Purbalingga,<br>Purbalingga,<br>Kedungmenjangan | Kedungmenjangan               |

|    |                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3  | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)                  | Akses petani membawa hasil pertanian ke luar wilayah mengalami kendala                                                                   | RW 02 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                                                     | Kedungmenjangan   |
| 4  | Pelatihan bidang perikanan                                                  | Hasil budidaya ikan tidak maksimal karena kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam penerapan teknologi budidaya ikan kolam air tenang | RW 01,RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                                     | Kedungmenjangan   |
| 5  | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM                                        | Tidak adanya bantuan modal usaha dan kurangnya kapasitas UMKM dan daya saing di Pasar                                                    | RW 01,RW 02 dan RW 03 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan                                     | Kedungmenjangan   |
| 6  | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani)          | Saluran irigasi blok persawahan gendowang rusak sepanjang 500 meter dan longosr di beberapa titik dekat rumah warga                      | Blok Persawahan Gendowang Rw 3 Kembaran Kulon, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon                                        | Kembaran Kulon    |
| 7  | Pembuatan sumur pantek irigasi                                              | Sering terjadi kekeringan dan suplai air dari sungai kurang                                                                              | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                                              | Toyareja          |
| 8  | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | Banyak lahan yang tidak dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi produktif                                                                 | Di Wilayah Rw. 09 Komplek Perumahan Gria Abdi Kencana Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan | Purbalingga Wetan |
| 9  | Pelatihan bidang perikanan                                                  | Membutuhkan pengembangan ilmu untuk pengelolaan sampah basah menjadi manggot.                                                            | Bojong RT 01 RW 03, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                                                                           | Bojong            |
| 10 | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | Harga pangan mengalami tren kenaikan sementara pendapatan masyarakat cenderung stagnan.                                                  | Seluruh RT di wilayah Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor                                     | Purbalingga Lor   |
| 11 | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)                                      | Untuk melestarikan kesenian daerah                                                                                                       | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                                              | Toyareja          |
| 12 | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas                               | Untuk peningkatan kelompok ternak yang ada didesa                                                                                        | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                                              | Toyareja          |

|    |                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                       |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM                               | Perlu pelatihan kepada UMKM agar dalam pengemasan produk lebih inovatif                                                               | Jalan S. Parman No.7, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                           | Bancar            |
| 14 | Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda                             | Perlunya pembinaan dan pelatihan pemuda dan karang taruna Kelurahan Bancar di bidang kesenian dan olah raga                           | Jl. S. Parman, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                                  | Bancar            |
| 15 | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)         | Belum ada akses jalan usaha tani ke lapangan desa dan sawah di tanah eks bengkok kelurahan Bancar di sebelah timur SMAN 2 Purbalingga | RT 01 RW 06 (sebelah timur SMAN 2 Purbalingga), Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar | Bancar            |
| 16 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | Kurang lebarnya Pintu Air di Sepanjang Sungai Salak sehingga aliran irigasi sawah kurang                                              | Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                               | Bancar            |
| 17 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | Saluran irigasi yang tidak memadai sehingga sawah tidak teraliri air di RT 001/001                                                    | RT 001/001, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                          | Purbalingga Kulon |
| 18 | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jitut jides)         | Kurang adanya akses Jalan Usaha Tani Kelurahan Bancar sampai Batas area Kelurahan Kedungmenjangan                                     | Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                               | Bancar            |
| 19 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | Kurang adanya saluran irigasi Blok Salam, Sijeruk, Sijati untuk proses masuknya air ke sawah                                          | Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                               | Bancar            |

**Tabel 2. 13 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RUMPUN BIDANG INFRASTRUKTUR  
PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2025**

| No  | Usulan                                                                       | Permasalahan                                                                                                                                                                          | Lokasi (desa/ kel)                                                                    | Kecamatan/<br>Desa/ Kelurahan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                               |
| (1) | (4)                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                   | (7)                                                                                   | (2)                           |
| 1   | Peningkatan Bendung Irigasi                                                  | Belum adanya pintu air pada Sungai Kabong sebagai pengontrol/pengendali air dan endapan lumpur sehingga ketika hujan lebat menimbulkan banjir                                         | DAM Sungai Kabong di RW 01, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang             | Kandanggampang                |
| 2   | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan                        | Ada kurang lebih 10 rumah belum tersentuh/tersedianya jaringan PDAM sehingga untuk keperluan air bersih harus mengambil dari sebelah. Dan sumur gali airnya keruh kurang menyehatkan. | RT 03/01, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kandanggampang                               | Kandanggampang                |
| 3   | Pemeliharaan jalan kabupaten                                                 | Jalan sudah rusak                                                                                                                                                                     | Jalan Ruas Toyareja - Bojong, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                 | Toyareja                      |
| 4   | Pembangunan ruang kelas/Gedung Penunjang TK Pertiwi                          | Belum terbangun tembok keliling TK Pertiwi                                                                                                                                            | RT 03 RW 02 Kelurahan Kedungmenjangan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kedungmenjangan | Kedungmenjangan               |
| 5   | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten | Masih minimnya adanya Lampu Penerangan Jalan                                                                                                                                          | Dusun 1 Dan Dusun 2 Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja            | Toyareja                      |
| 6   | Pemeliharaan jalan kabupaten                                                 | Sebagian jalan ada yang rusak                                                                                                                                                         | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                | Toyareja                      |
| 7   | Pelebaran jembatan kabupaten                                                 | Jembatan bagian bawah/abutmen sudah rusak dan perlu pelebaran jembatan karena lalulintas padat                                                                                        | Jembatan Kali Bugel Rt 01 Rw 03, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja              | Toyareja                      |

|    |                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8  | Pengadaan Bronjong                               | Antisipasi terjadinya longsor bantaran kalikajar RT 04/ RW 01 beserta pondasi jembatan yang sudah berlubang                              | Kelurahan Wirasana, RT 004 RW 001, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana                              | Wirasana       |
| 9  | Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan | Perbaikan talud saluran air dikarenakan air meluap saat hujan ke jalan sampai kerumah warga di kelurahan wirasana Wilayah RT 004 RW 003  | Kelurahan Wirasana RT 004 RW 003, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Wirasana                               | Wirasana       |
| 10 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai        | Talud Sungai Gemuruh dekat Pemukiman Warga terkena erosi dan terancam longsor baru di tangani sekitar 5 m, dari total yang terancam 30 m | Kembaran Kulon Rt 001 Rw 002 , Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon                            | Kembaran Kulon |
| 11 | Pembangunan drainase jalan kabupaten             | Banjir jika hujan di Jalan Banjaran Sari depan Rusunawa , karena tidak adanya drainase yang memadai                                      | Jalan Banjaran sari Rt 06 Rw 01 Kelurahan Kembaran Kulon, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon | Kembaran Kulon |
| 12 | Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa       | Sejak 2012 belum pernah di lakukan pemeliharaan                                                                                          | Jl Makam Rt 2 Rw 1, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Kembaran Kulon                                       | Kembaran Kulon |
| 13 | Pengadaan Bronjong                               | Tanah sepanjang kali bugel erosi tanah                                                                                                   | Rt 01 Rw 03 Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                      | Toyareja       |
| 14 | Pelatihan pengelolaan persampahan                | Pencemaran lingkungan akibat sampah                                                                                                      | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                  | Toyareja       |
| 15 | Penanganan persampahan skala desa                | Pencemaran Lingkungan akibat sampah                                                                                                      | Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                  | Toyareja       |
| 16 | Normalisasi sungai                               | Ada delta di tengah sungai klawing mengakibatkan aliran air menggerus sebelah kawasan pemukiman                                          | Sungai klawing di Rt 04 Rw 03 Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                    | Toyareja       |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                   |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17 | Pengadaan Bronjong                                         | Erusi tanah di sepanjang aliran sungai klawing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dusun 2 Desa Toyareja, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Toyareja                                                                                        | Toyareja          |
| 18 | Pemeliharaan jalan kabupaten                               | banyak jalan yg masih rusak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jalan Letnan Kusni (ruas jalan Bancar-Lamongan), Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba                                                              | Jatisaba          |
| 19 | Rehabilitasi saluran irigasi sekunder kewenangan kabupaten | Sedimentasi dan talud samping kanan kiri banyak yang rusak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jatisaba, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Jatisaba                                                                                                     | Jatisaba          |
| 20 | Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan           | Jalan Narasoma sudah rusak sering terkena banjir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Purbalingga Wetan, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Wetan                                                           | Purbalingga Wetan |
| 21 | Pengadaan rambu-rambu lalu lintas                          | Sering sekali terjadi kecelakaan lalu lintas di pertigaan depan Kantor Kelurahan Penambongan dikarenakan kendaraan yang melaju dari arah utara tidak terlihat dari arah selatan ataupun sebaliknya, dan seringkali pengendara melaju dengan kecepatan tinggi sehingga orang sangat sulit untuk menyebrang jalan di pertigaan tersebut, sehingga di perlukannya pemasangan Lampu Traffic Light agar para pengendara lebih berhati-hati di jalur tersebut dan nyaman digunakan untuk penyebrangan jalan. | Jl. Cahyana Baru No. 27 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan | Penambongan       |
| 22 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                  | Sering sekali terjadi banjir dan menyebabkan pejalan kaki yang lewat terpelosok di sisi-sisi sungai dikarenakan talud sungai yang sudah rusak dan longsor, sehingga talud sungai harus segera mungkin di rehabilitasi agar tidak ada lagi tanah yang longsor dan nyaman bagi pengguna jalan.                                                                                                                                                                                                           | Jl. Teratai Putih II RT. 04 RW. 07 Kelurahan Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan    | Penambongan       |

|    |                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                 |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23 | Pemeliharaan jalan kabupaten       | Kondisi jalan sudah rusak dan banyak yang berlobang sering membahayakan para pengguna jalan terlebih malam hari kondisi hujan.             | Jl. Y. Suparmin Bojong RT 03,04,05,06,07 RW 03, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                    | Bojong          |
| 24 | Pembangunan jalan kabupaten        | Belum tersedianya fasilitas jalan untuk pejalan kaki sehingga dibutuhkan pembangunan jalan trotoar.                                        | Jalan Bojong RT 01, 02 RW 04 , Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bojong                                     | Bojong          |
| 25 | Pembangunan jalan kabupaten        | Wilayah kumuh dan belum ada akses jalan bagi warga sekitar menuju arah ke Arsantaka                                                        | RT 03 RW 04 Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor                    | Purbalingga Lor |
| 26 | Pemeliharaan jalan kabupaten       | Jalan sudah rusak dan banyak warga masyarakat memerlukan                                                                                   | Jalan K.H Bachowi dan Jalan Pelita RW 01, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor                 | Purbalingga Lor |
| 27 | Pemeliharaan jalan kabupaten       | Jalan sudah rusak dan warga banyak memerlukan untuk mobilitas                                                                              | Jalan Kiswadi RW 02 Pesayangan Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor | Purbalingga Lor |
| 28 | Pembangunan jalan kabupaten        | Jalan sudah rusak dan warga memerlukan untuk mobilitas                                                                                     | Jalan Lingkungan Perumahan Permata RT 07 RW 01, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor           | Purbalingga Lor |
| 29 | Perbaikan drainase jalan kabupaten | Drainase belum ada pengaman bagi orang dan kendaraan yang melewati jalan disampingnya sehingga dikhawatirkan tercebur ke saluran drainase. | RT 02 RW 03 Dusun Blumbang Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor     | Purbalingga Lor |

|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 30 | Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa | RT membutuhkan alat bor biopori untuk menampung air hujan dikarenakan banyak lahan yang sudah tertutup bangunan                                                                                           | Seluruh RT di wilayah Kelurahan Purbalingga Lor, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Lor             | Purbalingga Lor       |
| 31 | Rehab kantor kecamatan                                               | Perbaikan atap kantor kecamatan karena bocor deras                                                                                                                                                        | Jalan Cahyana Baru, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan                                              | Kecamatan Purbalingga |
| 32 | Pembangunan kantor kecamatan                                         | Kantor Kecamatan Purbalingga belum memiliki musholla yang representatif sebagai sarana ibadah pegawai dan pengunjung kecamatan                                                                            | Jalan Cahyana Baru, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Penambongan                                              | Kecamatan Purbalingga |
| 33 | Rehabilitasi rumah tidak layak huni                                  | 8 (selapan) unit rumah sudah tidak layak huni                                                                                                                                                             | RT 003 DAN 004/002, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kulon                                        | Purbalingga Kulon     |
| 34 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai                            | Pinggiran Tebing Sungai Klawing di Wilayah Kelurahan Bancar, tanah dan bangunan warga banyak yang sudah terkikis arus Sungai Klawing. Karena area bantaran Sungai Klawing sebagai tempat permukiman warga | RT 001 RW 001 Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar                                       | Bancar                |
| 35 | Pemeliharaan jalan kabupaten                                         | Pengaspalan jalan samping DINPORA, jalan aspal sudah rusak, sedangkan jalan ini merupakan jalan alternatif utama alun - alun                                                                              | Purbalingga Kidul RT.003 RW.002, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul                           | Purbalingga Kidul     |
| 36 | Pemeliharaan jalan kabupaten                                         | Pembuatan/perbaikan trotoar Jl. Komisaris Noto Sumarsono, karena Trotoar di sepanjang jalan Komisaris Noto Sumarsono sudah rusak parah                                                                    | Purbalingga Kidul sepanjang jalan Komisaris Notosumarsono, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Purbalingga Kidul | Purbalingga Kidul     |



|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                       |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 37 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai | (Usulan Kecamatan) Sungai Gringsing di sepanjang aliran yang melintasi Kelurahan Bojong, Kedungmenjangan dan Penambongan sering terjadi banjir dan longsor dipemukiman dan tanah kuburan sehingga menyebabkan wilayah menjadi kumuh serta tidak sehat | Sepanjang aliran Sungai Gringsing di Kelurahan Bojong, Kedungmenjangan dan Penambongan, Kab. Purbalingga | Kecamatan Purbalingga |
| 38 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai | (Usulan Kecamatan) Pinggiran Tebing Sungai Klawing di Wilayah Kelurahan Bancar, tanah dan bangunan warga banyak yang sudah terkikis arus Sungai Klawing. Karena area bantaran Sungai Klawing sebagai tempat permukiman warga                          | RT 001 RW 001 Kelurahan Bancar, Kab. Purbalingga, Purbalingga, Bancar, Kab. Purbalingga                  | Kecamatan Purbalingga |
| 39 | Pemeliharaan jalan kabupaten              | (Usulan Kecamatan) Jalan Cempaka Raya Perum Penambongan rusak                                                                                                                                                                                         | Jalan Cempaka Raya Perumahan Penambongan, Kel. Penambongan, Kecamatan Purbalingga, Kab. Purbalingga      | Kecamatan Purbalingga |

Usulan ini nantinya akan diajukan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga dan keluarannya akan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam RKA ini akan menyajikan perubahan anggaran yang diajukan PD Kecamatan Purbalingga melalui KAK yang dikirimkan.

RKA PD Kecamatan Purbalingga hasil telaah dari Bappelitbangda Kecamatan Purbalingga mengalami perubahan paling signifikan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penambahan nilai anggaran karena gaji dan tunjangan dari Kelurahan dimasukkan ke dalam RKA Kecamatan Purbalingga.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PURBALINGGA**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, memasuki pelaksanaan Tahap Ke tahun Tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratik dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk *“Meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”*.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religious yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di atas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - i. Sekretariat Daerah;
  - ii. Sekretariat DPRD;
  - iii. Inspektorat;
  - iv. Dinas;
  - v. Badan dan
  - vi. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

.I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

I.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

I.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- a. Pengadaan Meubelair;

I.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

I.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
- V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- VI. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- a. Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

### **3.2 Tujuan dan Sasaran rencana Kerja Kecamatan Purbalingga**

Berdasarkan Renstra Kecamatan Purbalingga, penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah mulai tahun 2021 hingga tahun 2026. Penetapan tujuan tersebut idealnya harus dapat menggambarkan atau menjawab isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja Kecamatan Purbalingga.

Penetapan tujuan tersebut juga harus menggambarkan secara jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat diukur menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Mengacu kepada Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga yang tercantum dalam SKPD 2021 terdapat 5 program dan 11 kegiatan Kecamatan Purbalingga. Program dan kegiatan tersebut merupakan tanggungjawab dari 3 Seksi yang ada di Kecamatan Purbalingga.

Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara umum masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah Kecamatan Purbalingga yang meliputi:

1. Pelayanan Masyarakat / PATEN yang meliputi pelayanan:
  - 1.1. Pelayanan Perizinan:
    - 1.1.1. Pelayanan Izin Dispensasi Nikah;
    - 1.1.2. Pelayanan Izin Keramaian;
    - 1.1.3. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
  - 1.2. Pelayanan Nonperizinan:
    - 1.2.1. Pelayanan KTP dan KK;
    - 1.2.2. Pelayanan Keterangan Domisili WNI dan WNA;
    - 1.2.3. Pelayanan Surat Keterangan Usaha;

1.2.4. Pelayanan PPAT;

1.2.5. Pelayanan Legalisasi Surat;

2. Fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes dan Perkades);
3. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. Pendampingan pengadaan Perangkat Desa;
5. Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan;
6. Fasilitasi Pelatihan Satlinmas/Hansip;
7. Melaksanakan Kegiatan HUT RI;
8. Melaksanakan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Purbalingga;
9. Pembinaan/Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;
10. Fasilitasi/koordinasi pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanggulangan bencana bersama-sama forkopimcam dan instansi terkait;
11. Pelaksanaan Operasi Jam Malam bersama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
12. Pelaksanaan operasi pendisiplinan pemakaian masker bagi masyarakat bersama-sama Unsur TNI-POLRI-Satpol PP;
13. Pengkoordinasian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
14. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang lainnya.

Sama halnya dengan Seksi Bidang Masyarakat Desa yang memiliki program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi/Koordinasi Penyelenggaraan Musdes/Musrenbandes di tingkat desa;
2. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
3. Mengikuti Musrenbang tingkat Kabupaten;
4. Rekomendasi Proposal-proposal Bangub/BanProv, ADD, DD;
5. Melaksanakan *Roadshow* UMKM;

Masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang harus dilaksanakan dan direalisasikan di wilayah Kecamatan Purbalingga.

Seksi Kesejahteraan Rakyat pun dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan masih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Purbalingga. Meskipun, beberapa kegiatan seremonial yang mengundang banyak kerumunan harus ditiadakan seperti kegiatan Pawai Hari Santri, Sunatan Massal, dan Nikah Massal. Program dan Kegiatan dari Seksi Kesejahteraan Rakyat meliputi:



1. Melaksanakan kegiatan Istighozah;
2. Mengikuti kegiatan Pawai Ta'aruf;
3. Mengikuti kegiatan Hari Santri;
4. Mengikuti kegiatan perlombaan di bidang seni budaya dan olahraga;
5. Mengikuti kegiatan PKK;
6. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita;
7. Mengikuti kegiatan GOPTKI;
8. Penyaluran Bansos dan Bankesra;
9. Menghimpun dana PMI;
10. Mengikuti kegiatan Sunatan massal dan Nikah Massal;

Memperhatikan beberapa kebijakan nasional yang terkait dengan tugas Pokok Perangkat Daerah seperti pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, SPM memiliki beberapa urusan Pemerintah Wajib yang terdiri dari beberapa jenis. Jenis SPM sendiri terdiri dari:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial;

Kecamatan Purbalingga berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan di atas terutama terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat dari sisi keamanan data pribadi masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga dilakukan dengan cara menyimpan data pribadi yang diurus oleh masyarakat seperti salinan KTP atau KK di tempat yang aman.

Setelah beberapa waktu, data-data yang sudah dipastikan tidak terpakai tersebut akan dimusnahkan demi keamanan data pribadi masyarakat. Kerawanan atas data pribadi menjadi permasalahan yang coba diminimalisir oleh Kecamatan Purbalingga demi menghindari penyalahgunaan data pribadi warga masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penjabaran tujuan dari Kecamatan Purbalingga kemudian akan mengarah pada sasaran yang ingin dicapai dan senantiasa diusahakan oleh segenap pegawai

Kecamatan Purbalingga. Sasaran Kecamatan Purbalingga dianggap tercapai apabila setiap indikator pencapaian di setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap seksi dan bidang di Kecamatan Purbalingga terpenuhi.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Purbalingga Kab. Purbalingga pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PURBALINGGA TAHUN 2023**

| NO | TUJUAN                                              | SASARAN                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                     |                                                                                             |                                                     | 2022                                     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan | Tercapainya kualitas pelayanan publik yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Rata-rata Capaian IKM Unit Pelayanan Publik         | 86                                       | 87   | 88   | 89   | 90   |
|    |                                                     | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan                                                | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (IKU Kecamatan) | 86                                       | 87   | 88   | 89   | 90   |
|    |                                                     | 2. Meningkatkan Kualitas kelembagaan Kecamatan                                              | 1. Nilai SAKIP OPD                                  | 45                                       | 50   | 60   | 62   | 65   |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Purbalingga merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Purbalingga selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Purbalingga.

Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

#### a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Purbalingga Tahun Anggaran 2023, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
    - Pengadaan Meubelair;

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PURBALINGGA**

Rencana program dan kegiatan PD Kecamatan Purbalingga senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan visi dan misi Bupati Purbalingga agar apa yang tersusun dalam program dan kegiatan tersebut selaras dan sebisa mungkin menggambarkan realisasi atas visi misi Bupati Purbalingga. Kebijakan pembangunan daerah merupakan bagian terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional.

Visi misi Kabupaten Purbalingga sendiri adalah “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. Visi ini kemudian dijabarkan dalam beberapa misi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius, beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinnekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Atas dasar arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang diwujudkan dalam bentuk visi dan misi tersebut, menjadi dasar acuan dan landasan



operasional bagi Kecamatan Purbalingga dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan untuk menyusun prioritas program dan mendukung misi ke satu (1) yaitu dengan melakukan fungsi pelayanan prima terhadap masyarakat.

Program dan kegiatan Kecamatan Purbalingga di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Akhir kecamatan Purbalingga tahun 2021 - 2026

Program dan kegiatan Kecamatan Purbalingga 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan Rencana Kerja RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Adapun analisa kebutuhan dalam rancangan renja kecamatan Purbalingga tahun 2022 serta prakiraan maju Tahun 2025 dalam progam dan kegiatan kami sajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel - 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
SKPD Kecamatan purbalingga Kabupaten Purbalingga (Sub Kegiatan)

SKPD : KECAMATAN PURBALINGGA

|   | JENIS URUSAN | BID. URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(ou tput) /Sub Kegiatan (sub output)                                     | RENCANA TAHUN 2025 |                        |                                |             | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                                |
|---|--------------|-------------|---------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|   |              |             |         |          |              |                                                                            |                                                                                                                       | LOKASI             | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA |                 | TARGET CAPAIAN KINERJA            | KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF |
| 1 |              |             |         |          |              | 2                                                                          | 3                                                                                                                     | 4                  | 5                      | 6                              | 8           | 8               | 9                                 | 10                             |
|   | 07           | 01          |         |          |              | KECAMATAN                                                                  |                                                                                                                       | Kec. Purbalingga   |                        | 10.370.390.000                 | APBD        |                 |                                   | 10.370.390.000                 |
|   | 07           | 01          | 01      |          |              | Bidang urusan Generik                                                      |                                                                                                                       |                    |                        |                                |             |                 |                                   |                                |
|   | 07           | 01          | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                 | Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah                                                           | Kec. Purbalingga   | 100 %                  | 10.212.397.000                 | APBD        |                 | 100 %                             | 10.212.397.000                 |
|   | 07           | 01          | 01      | 2.01     |              | Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah               | Terlaksanannya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja perangkat daerah                                          | Kec. Purbalingga   | 2 kegiatan             | 10.000.000                     | APBD        |                 | 2 kegiatan                        | 10.000.000                     |
|   | 07           | 01          | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah                            | Tersusunnya dokumen Rencana Kerja                                                                                     | Kec. Purbalingga   | 2 kegiatan             | 6.000.000                      | APBD        |                 | 2 kegiatan                        | 6.000.000                      |
|   | 07           | 01          | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP, dan RB) tersusun dengan baik |                    | 2 kegiatan             | 4.000.000                      | APBD        |                 | 2 kegiatan                        | 4.000.000                      |
|   | 07           | 01          | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan PD                                                   | Terlaksananya administrasi keuangan kantor                                                                            | Kec. Purbalingga   | 12 bulan               | 9.906.385.000                  | APBD        |                 | 1<br>2 bulan                      | 9.906.385.000                  |

|  |    |    |    |      |    |                                                                         |                                                                                               |                  |             |               |      |  |              |               |
|--|----|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|------|--|--------------|---------------|
|  | 07 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Gaji dan tunjangan ASN terbayar tepat waktu                                                   | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 9.906.385.000 | APBD |  | 14 bulan     | 9.906.385.000 |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | terdokumentasikannya kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam dan luar daerah | Kec. Purbalingga | 17 org/hari | 1.296.000     | APBD |  | 400 org/hari | 1.296.000     |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                               | Tersedianya honor pengelola keuangan                                                          | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 26.900.000    |      |  |              | 26.900.000    |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.03 |    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>           | Inventarisir Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Kec. Purbalingga |             | 900.000       | APBD |  |              | 900.000       |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Tersedianya honor pejabat pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus barang                             |                  | 1 kegiatan  | 900.000       | APBD |  | 1 kegiatan   | 900.000       |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | Terlaksananya administrasi Umum                                                               | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 19.666.000    | APBD |  | 12 bulan     | 19.666.000    |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor      | Tersedianya perlengkapan listrik                                                              | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 966.000       | APBD |  | -            | 966.000       |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Tersedianya bahan logistik kantor                                                             | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 10.600.000    | APBD |  |              | 10.600.000    |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Tersedianya menu jamuan tamu                                                                  | Kec. Purbalingga | 100 orang   | 1.000.000     | APBD |  |              | 1.000.000     |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Tersedianya jamuan rapat                                                                      | Kec. Purbalingga | 64 orang    | 3.800.000     | APBD |  |              | 3.800.000     |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Tersedianya honor operator Simda dan Sim Aset, SIPD                                           | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 3.300.000     | APBD |  |              | 3.300.000     |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah                  | Kec. Purbalingga | 1 unit      | 4.000.000     | APBD |  |              | 4.000.000     |

|  |    |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                          |                  |          |             |      |  |          |             |
|--|----|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|------|--|----------|-------------|
|  | 07 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Peralatan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya                                  | Kec. Purbalingga | 1 unit   | 4.000.000   | APBD |  |          | 4.000.000   |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 04   | <b>Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                            | Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah                           | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 155.770.000 | APBD |  | 12 bulan | 155.770.000 |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 02   | Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik                                                                     | Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet    | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 46.110.000  | APBD |  | 12 bulan | 46.110.000  |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 03   | Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor                       | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 1.000.000   |      |  | 12 bulan | 1.000.000   |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.08 | 04   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                           | Tersedianya jasa pelayanan umum kantor                                   | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 108.660.000 | APBD |  | 12 bulan | 108.660.000 |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</b>                                      | Terpeliharannya barang milik daerah                                      | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 87.480.000  | APBD |  | 12 bulan | 87.480.000  |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kendaraan dinas yang terawat dengan baik                                 | Kec. Purbalingga | 11 unit  | 71.480.000  | APBD |  |          | 71.480.000  |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                        | Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya                               | Kec. Purbalingga | 2 jenis  | 6.000.000   | APBD |  |          | 6.000.000   |
|  | 07 | 01 | 01 | 2.09 | 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                        | Kec. Purbalingga |          | 10.000.000  | APBD |  |          | 10.000.000  |
|  | 07 | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                | Terselenggaranya program pemerintahan dan pelayanan publik               | Kec. Purbalingga | 100 %    | 43.712.000  | APBD |  | 100 %    | 43.712.000  |
|  | 07 | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                    | Terkordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan | Kec. Purbalingga | 12 bulan | 41.472.000  | APBD |  | 12 bulan | 41.472.000  |

|  |    |    |    |      |    |                                                                                           |                                                                          |                  |                   |            |      |  |          |            |
|--|----|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------|--|----------|------------|
|  | 07 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa              | Kec. Purbalingga | 2 kegiatan        | 41.472.000 | APBD |  | 12 bulan | 41.472.000 |
|  | 07 | 01 | 02 | 2.04 |    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                      | Cakupan pelanggaran perda yang ditangani                                 | Kec. Purbalingga | 12 bulan          | 2.240.000  |      |  |          | 2.240.000  |
|  | 07 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha         | Terfasilitasinya pelayanan perizinan non usaha                           | Kec. Purbalingga | 12 bulan          | 2.240.000  |      |  |          | 2.240.000  |
|  | 07 | 01 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 | Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan      | Kec. Purbalingga | 100%              | 42.723.000 | APBD |  | 12 bulan | 42.723.000 |
|  | 07 | 01 | 03 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                              | Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa                              | Kec. Purbalingga | 12 bulan          | 42.723.000 | APBD |  | 12 bulan | 42.723.000 |
|  | 07 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu | Kec. Purbalingga | 13 desa/kelurahan | 7.000.000  | APBD |  | 12 bulan | 7.000.000  |
|  | 07 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan             | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi                         | Kec. Purbalingga | 17 kegiatan       | 35.723.000 | APBD |  | 12 bulan | 35.723.000 |
|  | 07 | 01 | 04 |      |    | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                 | Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum                         | Kec. Purbalingga | 100 %             | 44.373.000 | APBD |  | 100 %    | 44.373.000 |
|  | 07 | 01 | 04 | 2.01 |    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                  | Terkoordinanya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum            | Kec. Purbalingga | 12 bulan          | 44.373.000 | APBD |  | 12 bulan | 44.373.000 |

|  |    |    |    |      |    |                                                                                                                               |                                                                        |                  |             |            |      |  |          |            |
|--|----|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------|--|----------|------------|
|  | 07 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan  | Kec Purbalingga  | 12 kegiatan | 23.500.000 | APBD |  | 12 bulan | 23.500.000 |
|  | 07 | 01 |    | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh agama dan masyarakat                                                                        | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat                   | Kec. Purbalingga | 12 kegiatan | 20.873.000 | APBD |  | 100%     | 20.873.000 |
|  | 07 | 01 | 05 | 2.01 |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                       | Terselenggaranya urusan pemerintah umum                                | Kec. Purbalingga | 100 %       | 29.185.000 | APBD |  | 100 %    | 29.185.000 |
|  | 07 | 01 | 05 | 2.01 |    | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                | Terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 29.185.000 | APBD |  | 12 bulan | 29.185.000 |
|  | 07 | 01 | 05 | 2.01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa    | Kec. Purbalingga | 12 bulan    | 29.185.000 | APBD |  | 12 bulan | 29.185.000 |
|  | 07 | 01 | 06 |      |    | <b>PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                      | Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | Kec. Purbalingga | 3 kegiatan  | 2.000.000  | APBD |  | 12 bulan | 2.000.000  |
|  | 07 | 01 | 06 | 2.01 |    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                      | Terselenggaranya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa            | Kec. Purbalingga | 3 kegiatan  | 2.000.000  | APBD |  | 12 bulan | 2.000.000  |
|  | 07 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                |                                                                        | Kec. Purbalingga | 3 kegiatan  | 1.000.000  | APBD |  | 12 bulan | 1.000.000  |
|  | 07 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                                  |                                                                        | Kec. Purbalingga |             | 1.000.000  | APBD |  |          | 1.000.000  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purbalingga akan mengalami tren perbaikan kehidupan yang dinamis dikarenakan pandemic covid-19 sudah mulai hilang baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Purbalingga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Purbalingga itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Purbalingga dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Purbalingga sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purbalingga.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Purbalingga Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Purbalingga dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

CAMAT PURBALINGGA

Dra. YUNI RAHAYU., M.Si

NIP. 19690601 198803 2 001



**MATRIKS LEMBAR KERJA**  
**GENDER ANALYSIS PATHWAY**  
**Tahun 2025**

|         |                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARIS 1 | Provinsi             |                                   | Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | OPD                  |                                   | Kecamatan Purbalingga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Urusan yang diampu   |                                   | 7.01 Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Nama Program         |                                   | 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Nama Kegiatan        |                                   | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Nama Sub Kegiatan    |                                   | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Tujuan Sub Kegiatan  |                                   | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BARIS 2 | Data Pembuka Wawasan |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah penduduk kecamatan Purbalingga sebanyak 57.071 jiwa, dengan rincian Laki-laki 28.307 jiwa dan Perempuan 28.764 jiwa</li> <li>▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan 40 orang rata-rata 35 % dari total peserta.</li> <li>▪ Peserta Musrenbang Kecamatan 115 orang yang berasal dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya rata-rata sebesar 39%</li> <li>▪ Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender</li> </ul> |
| BARIS 3 | ISU GENDER           | Faktor kesenjangan / permasalahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relatif terbatas</li> <li>▪ Partisipasi dalam Musrenbang relatif terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki</li> <li>▪ Kontrol terhadap usulan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                 |                                     | <p>program/kegiatan yang diprioritaskan /diusulkan ke jenjang berikutnya relatif terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.</li> <li>▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan.</li> </ul> |
|         |                                                                                                 | Sebab Kesenjangan Internal (di OPD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu/fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender</li> <li>▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                 | Sebab Kesenjangan Eksternal         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga</li> <li>▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.</li> </ul>                                                                |
| BARIS 4 | Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender                                                            |                                     | Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BARIS 5 | Rencana Aksi<br>Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukkan dalam RKA |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.</li> <li>▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  |                                | <p>perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder</li> <li>▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BARIS 6 | Baseline Data    |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta Perempuan dari utusan desa/ kelurahan sebanyak 40 orang dari total 115 orang</li> <li>▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan , anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 45 orang dari total 115 orang total peserta</li> <li>▪ 77% Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur</li> </ul>                                     |
| BARIS 7 | PENGUKURAN HASIL | Output (Sub Kegiatan)          | <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang</li> </ul> <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Desa ,11 kelurahan</li> <li>▪ 45 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</li> </ul> |
|         |                  | Immediate Outcome (Kegiatan)   | <p>Indikator Kinerja:</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                  | Intermediate Outcome (Program) | <p>Indikator Kinerja:</p> <p>Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja:</p> <p>100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  | Ultimate Outcome (Sasaran)     | <p>Indikator Kinerja:</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                 |                                                                                         |
|--|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                 | kecamatan<br>Target Kinerja:<br>100%                                                    |
|  |  | Impact (Tujuan) | Indikator Kinerja:<br>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik<br>Target Kinerja:<br>100% |

# PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Tahun 2025

**Nama OPD** : Kecamatan Purbalingga  
**Urusan Yang Diampu** : 7.01. Kecamatan  
**Kabupaten/Kota** : Kabupaten Purbalingga  
**Tahun Anggaran** : 2025

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Program</b>          | 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kegiatan</b>         | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sub Kegiatan</b>     | <u>7.01.03.2.01.01</u> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Analisis Situasi</b> | <p>Kecamatan Purbalingga mengalami beberapa perubahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya</li> <li>• Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata 35% dari total peserta.</li> <li>• Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender</li> </ul> <p>Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas dalam Musrenbang relatif terbatas</li> <li>• Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relatif terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki</li> <li>• Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas</li> <li>• Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</li> <li>• Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender</li> <li>Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat</li> </ul> <p>Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga</li> <li>Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rencana Tindakan lanjut</b> | <b>Sub Kegiatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u>7.01.03.2.01.01</u> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | <b>Tujuan Sub kegiatan Responsif gender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | <b>Rencana Tindakan lanjut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang</li> <li>Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan.</li> <li>Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder</li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> |
| <b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>     | <b>Anggaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 3.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | <b>SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Peserta 105 Orang<br>Jumlah Panitia 10 Orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | <b>Peralatan dan Mesin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LCD Projector<br>Buku Catatan<br>Laptop<br>Soundsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Output</b>                  | <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</li> <li>Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Target Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 desa, 11 kelurahan</li> <li>▪ 73 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</li> </ul> |
| <b>Immediate Outcome (Kegiatan)</b>     | Indikator Kinerja:<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa<br>Target Kinerja:<br>100%                                                                                                             |
| <b>Intermediately Outcome (Program)</b> | Indikator Kinerja:<br>Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan<br>Target Kinerja:<br>100%                                                                                                   |
| <b>Ultimate Outcome (Sasaran)</b>       | Indikator Kinerja:<br>Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan<br>Target Kinerja:<br>100%                                                                                                         |
| <b>Impact (Tujuan)</b>                  | Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik<br>Target Kinerja:<br>100%                                                                                                               |

CAMAT PURBALINGGA

Dra. YUNI RAHAYU, M.Si  
 Pembina TK I  
 NIP. 19690601 198803 2 001

## Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Kab. Purbalingga  
 Nama OPD : Kec. Purbalingga  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

[illegible]



|  |                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                         |      |                    |                                                                                  |           |    |                                                                        |                                                            |   |   |    |                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan                         | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan                         | Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan tidak disusun secara lengkap | RO01 | Kasi Pemtrant ibum | Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut                               | Internal  | C  | Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen | Instansi Kecamatan                                         | 4 | 3 | 12 | - menyusun notulensi pada setiap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan |
|  | Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                    | Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan                                                                       |                                                                                                         |      |                    |                                                                                  |           |    |                                                                        |                                                            |   |   |    |                                                                                                                         |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha         | Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan                                                     | Lambatnya pelayanan dalam menerbitkan dokumen non perizinan                                             | RO02 | Kasi Pemtrant ibum | Budaya kerja SDM pelayanan dikecamatan kurang prima                              | Internal  | C  | Pelayanan Masyarakat kurang maksimal                                   | Instansi Kecamatan dan warga masyarakat penerima pelayanan | 4 | 3 | 12 | - membuat inovasi yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan                                                           |
|  | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                  | Persentase Keaktifan lembaga desa dan kelurahan Kecamatan Purbalingga                                    |                                                                                                         |      |                    |                                                                                  |           |    |                                                                        |                                                            |   |   |    |                                                                                                                         |
|  | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                            | Jumlah Fasilitasi Lembaga dan Forum Kemasyarakatan                                                       |                                                                                                         |      |                    |                                                                                  |           |    |                                                                        |                                                            |   |   |    |                                                                                                                         |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Beberapa usulan desa tidak tersampaikan                                                                 | RO03 | Kasi PMD           | Adanya aplikasi baru yang membuat banyak warga kesulitan untuk mengajukan usulan | Eksternal | UC | Usulan tidak menjadi prioritas di kecamatan maupun kabupaten           | Desa dan Kecamatan                                         | 3 | 4 | 12 | -melakukan pendampingan pada saat musdes sampai musrenbang kabupaten                                                    |

|  |                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                     |      |                      |                                                                             |           |   |                                                                        |                              |   |   |    |                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah laporan peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Keterlambatan laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | RO04 | Kasi PMD, Kasi Kesra | Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut                          | Internal  | C | Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen | Desa dan Kecamatan           | 3 | 4 | 12 | Menyusun dokumen laporan segera setelah pelaksanaan kegiatan                                                                    |
|  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                            | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan             |                                                                                                     |      |                      |                                                                             |           |   |                                                                        |                              |   |   |    |                                                                                                                                 |
|  | Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                                                     | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum                             |                                                                                                     |      |                      |                                                                             |           |   |                                                                        |                              |   |   |    |                                                                                                                                 |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan kejadian gangguan ketentraman yang dilaporkan                                 | Banyak kejadian gangguan trantibum yang tidak terpantau oleh kecamatan                              | RO05 | Kasi Pemtrantibum    | Kurang pahamnya warga masyarakat terhadap alur pengaduan gangguan trantibum | Eksternal | C | Permasalahan warga tidak segera tertangani                             | Warga dan Instansi Kecamatan | 3 | 4 | 12 | - Melakukan patroli lingkungan dan sosialisasi secara periodik                                                                  |
|  | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat      | Keterlambatan laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat            | RO06 | Kasi Kesra           | Belum adanya pemahaman pentingnya dokumen tersebut                          | Internal  | C | Tidak dapat melakukan evaluasi kinerja karena tidak lengkapnya dokumen | Instansi Kecamatan           | 3 | 4 | 12 | Berkoordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk segera melaporkan apabila ada kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan |

|  |                                                                                            |                                                                                   |                                                                   |      |                     |                                                                                 |           |   |                                                                    |                              |   |   |    |                                                             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------|
|  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                           | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan                                           |                                                                   |      |                     |                                                                                 |           |   |                                                                    |                              |   |   |    |                                                             |
|  | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Laporan Bulanan potensi konflik                                            |                                                                   |      |                     |                                                                                 |           |   |                                                                    |                              |   |   |    |                                                             |
|  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                    | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa               | Materi tidak dapat diimplementasikan para peserta pasca pembinaan | RO07 | Kasi Pemtrant ibum  | Belum terkonsep dengan baik kegiatan pembinaan dan persatuan                    | Internal  | C | Peserta pembinaaan tidak bisa menjadi agen perubahan di masyarakat | warga dan instansi Kecamatan | 4 | 3 | 12 | - Mematangkan konsep pembinaan yang akan dilakukan          |
|  | Pprogram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                        | Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi                                |                                                                   |      |                     |                                                                                 |           |   |                                                                    |                              |   |   |    |                                                             |
|  | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi                                |                                                                   |      |                     |                                                                                 |           |   |                                                                    |                              |   |   |    |                                                             |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Keterlambatan dokumen dalam administrasi tata pemerintahan desa   | RO08 | Kasii Pemtrant ibum | Ada desa yang belum menyadari pentingnya administrasi tata pemerintahan an desa | Eksternal | C | Menghambat pelaksanaan kegiatan desa                               | Desa dan Instansi Kecamatan  | 3 | 4 | 12 | - monitoring administrasi pemerintahan desa secara intensif |

